



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)  
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB  
KABUPATEN ASMAT  
JI. Frans Kaisepo**

---

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2023 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Asmat, 9 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN  
ASMAT

  
**MARGARETHA WABISER, SE**  
PEMBINA  
NIP. 19780604 200502 2 004

---

## ***DAFTAR ISI***

---

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar.....  | i   |
| Daftar Isi .....   | ii  |
| Daftar Tabel.....  | iii |
| Daftar Gambar.....   | iv  |
| <b>BAB I Pendahuluan</b>   |     |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 7   |
| 1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....  | 10  |
| 1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....   | 11  |
| 1.2.2 Anggaran .....   | 12  |
| 1.3 Dasar Hukum .....  | 13  |
| 1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....  | 14  |
| <b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>  |     |
| 1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....  | 21  |
| 1.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 .....   | 24  |
| 1.3 Perjanjian Kinerja 2024 .....  | 28  |
| <b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>   |     |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....   | 32  |
| 3.1.1. Skala Capaian Kinerja .....   | 34  |
| 3.1.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....  | 35  |
| 3.1.3. Membandingdingkan Antara Realisas dan beberapa tahun terakhir   | 38  |
| 3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumentasi Perencanaan Strategis Organissi ..... | 39  |
| 3.1.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Menengah.....  | 40  |
| 3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....                             | 41  |
| 3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....  | 42  |
| 3.1.8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun  |     |

|   |    |
|---|----|
| Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ..... | 43 |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                  | 51 |
| BAB IV Penutup .....                          | 43 |

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Rencana Aksi Dinas PPKB tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. IKU 2024;

---

## ***DAFTAR TABEL***

---

### **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1** Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

**Tabel 2.1** Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun Periode Rencana Strategis

**Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

**Tabel 2.3** Rencana Kinerja Tahun n

**Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah

**Tabel 2.5** Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun n

**Tabel 2.6** Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah

**Tabel 2.7** Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat  
Daerah Tahun n

**Tabel 3.1** Pengkategorian Capaian Kinerja

**Tabel 3.2** Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n

**Tabel 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja

**Tabel 3.4** Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

**Tabel 3.5** Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/  
Kabupaten/Kota

**Tabel 3.6** Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

**Tabel 3.7** Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan  
dan Sasaran

**Tabel 3.8** Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan  
Kegiatan

**Tabel 3.9** Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

---

***DAFTAR GAMBAR***

---

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

- 2 Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat

daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana gambar berikut :

### **1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Asmat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

#### **2.1.1. Tugas Pokok**

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### **2.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan

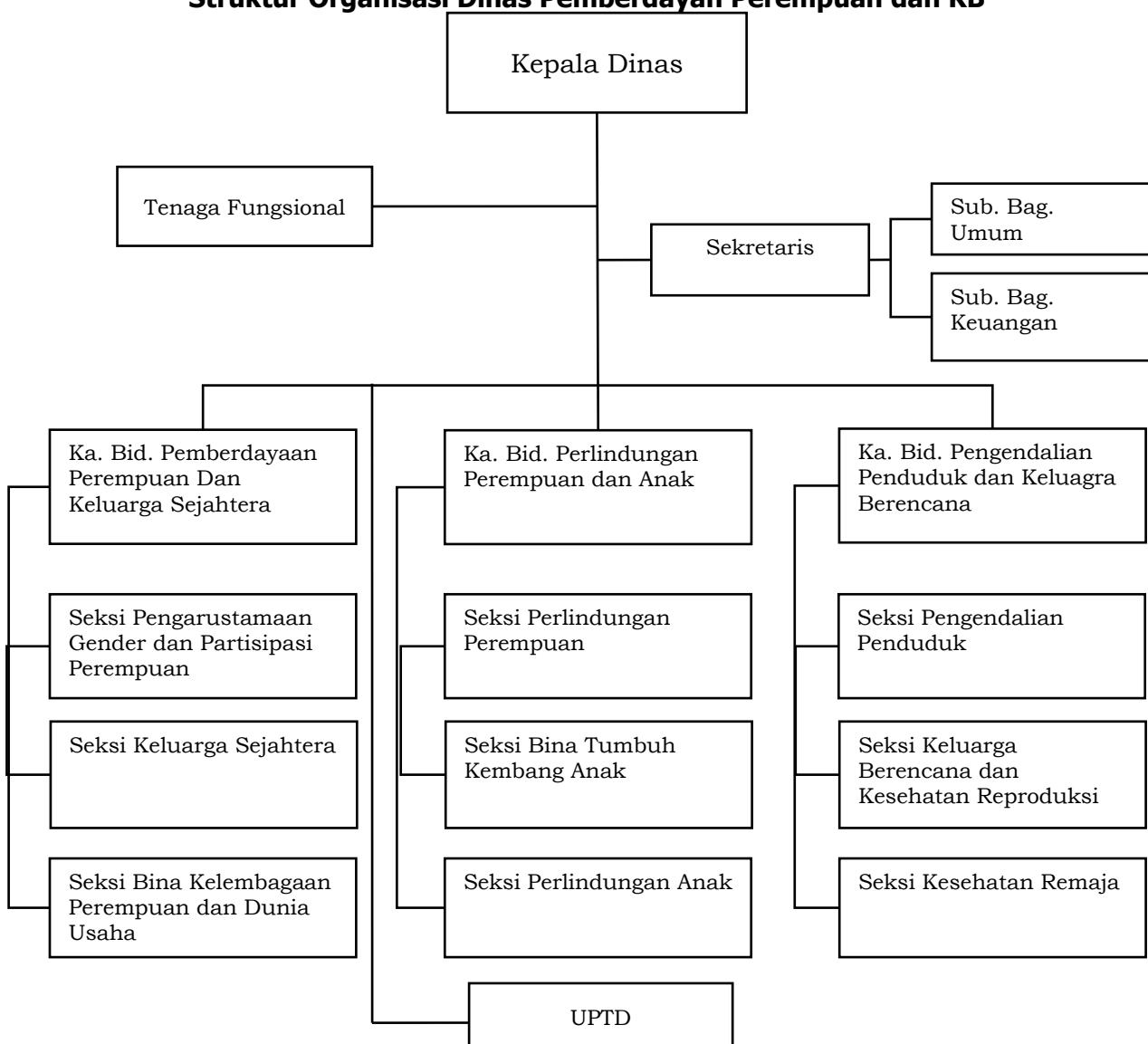
- perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Berikut bagan struktur organisasi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB**



## **1.2.2 Anggaran**

Berikut Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana :

**Tabel 1.1**

**Pembanding Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n**

| <b>Sumber</b> | <b>Tahun</b> | <b>Jumlah</b>     |
|---------------|--------------|-------------------|
| (1)           | (2)          | (3)               |
| APBD          | Tahun n-1    | Rp 14.966.249.075 |
| APBD          | Tahun n      | Rp 14.704.821.719 |

## **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Asmat Nomor 107 Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat.

#### **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Tahun
3. Renksi Tahun
4. Daftar Aset Tahun

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Meningkatnya Pegarustamaan Gender dan Juga Meningkatnya Penerapan Prinsip – Prinsip Good Goverment dan Clean Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2021-2025**

| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>                    | <b>Sasaran</b>                            | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja Pada Tahun</b> |             |             |             |             |
|-----------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                  |   |   | <b>2021</b>                      | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| (1)       | (2)                              | (3)                                       | (4)   | (5)                              | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         |
|           | Meningkatnya Pemberdayaan Gender | Meningkatnya Pemberdayaan Gender          | Rasio KDRT  | 16                               | 15          | 10          | 10          | 10          |
|           |                                  |   | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tidak Kekerasan | 10                               | 10          | 10          | 10          | 10          |
|           |                                  |   | Indeks Pemberdayaan Gender  | 49,48                            | 49,48       | 49,50       | 49,55       | 50,12       |
|           |                                  | Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana | Rata-rata Anak Per Keluarga   | 15,50                            | 20,15       | 25,40       | 30,12       | 35,50       |
|           |                                  |   | Rasio Akseptor KB   | 25                               | 25          | 30          | 35          | 40          |
|           |                                  |   | Cakupan Peserta KB Aktif  | 6,261                            | 6,261       | 7,156       | 7,861       | 8,180       |

*Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb Periode 2021 - 2025*

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb Tahun n**

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja                              | Satuan | Penjelasan   |   |   |
|-----|--|--|--------|--|---|---|
|     |  |  |        | Definisi Operasional   | Formulasi/ Rumus Perhitungan  | Sumber Data                               |
| (1) | (2)                                    | (3)  | (4)    | (5)  | (6)   | (7)                                       |
| 1   | Peningkatan Pelayanan untuk Masyarakat | Rata - rata Anak per Keluarga                  | Orang  | Rata - rata Anak Dalam satu Keluarga                             | Jumlah Anak yang dilahirkan per Keluarga  | Aplikasi Sistem Infirmasi Keluarga (SIGA) |
|     |  | Rasio Akseptor KB                              | Orang  | Jumlah Perbandingan antara Peserta KB dengan Usia Pasangan subur | Pengukuran kuantitatif dari jumlah individu atau pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) | Aplikasi Sistem Infirmasi Keluarga (SIGA) |
|     |  | Cakupan Peserta KB                             | Orang  | Cakupan Peserta KB Aktif yang memperoleh pelayanan               | Jumlah peserta KB aktif dari setiap pasangan usia subur   | Aplikasi Sistem Infirmasi Keluarga (SIGA) |
|     |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera) | Orang  | Tingkat kemiskinan keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera | Peningkatan Kesejahteraan Keluarga  | Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga |

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                                   | Satuan | Penjelasan  |   |   |
|-----|--|---|--------|---|---|---|
|     |  |   |        | Definisi Operasional  | Formulasi/ Rumus Perhitungan  | Sumber Data   |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)   | (7)   |
|     |  |   |        |   |   | Sejahtera   |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | Orang  | Tingkat Partisipasi perempuan yang aktif melaksanakan Tugas di lembaga pemerintah baik yang ada di kampung,distrik atau pun dikota kabupaten. | Peningkatan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah                       | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera        |
|     |  | Rasio KDRT  | Kasus  | Perbandigan atau pun pengukuran KDRT per kasus dengan 100.000 Orang.  | Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga | Aplikasi Simponi Kementerian Perlindungan Peremuan dan Anak |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                   | Orang  | Persentase Pekerja anak yang ada dikabupaten Asmat  | Peningkatan pekerja anak usia 5-14 tahun dan jumlah pekerja usia 5 tahun keatas | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak                      |
|     |  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                | Orang  | Jumlah Persentase Partisipasi Perempuan di dunia kerja  | Prosedur penanganan pengaduan langsung  | Bidang Perlindungan Perempuan dan                           |

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Satuan  | Penjelasan   |   |   |
|-----|--|--|---------|--|---|---|
|     |  |  |         | Definisi Operasional   | Formulasi/ Rumus Perhitungan                  | Sumber Data                                   |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)     | (5)  | (6)   | (7)   |
|     |  |  |         | dibandingkan dengan jumlah partisipasi perempuan yang tidak bekerja                    | dan tidak langsung                            | Anak  |
|     |  |  |         | Jumlah Pegaduan perempuan atas tidak kekerasan yang ada di kabupaten Asmat Tahun 2024. | Penilaian Inspektorat atas laporan Kineja OPD | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak        |
| 3   | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | Laporan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                      |   | Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten. |

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Nomor 5 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

### **2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024**

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2024:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb**  
**Tahun 2024**

| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>                                   | <b>Satuan</b> | <b>Target</b> |
|-----------|---|--|--|---------------|---------------|
| (1)       | (2)   | (3)  | (4)  | (5)           | (6)           |
| 1         | Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | Laporan       | B             |
| 2         | Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan  | Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat          | Rata - rata Anak per Keluarga                              | Orang         | 4 orang       |
|           |   |  | Rasio Akseptor KB  | Orang         | 0,6 %         |
|           |   |  | Cakupan Peserta KB   | Orang         | 56,89 %       |
|           |   |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)             | %             | 8,54%         |
| 3         | Meningkatnya Pengarustamaan Gender  | Peningkatan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga                   | Orang         | 35,30%        |

| No  | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja                    | Satuan | Target |
|-----|--------|---------|--------------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2)    | (3)     | (4)                                  | (5)    | (6)    |
|     |        |         | Pemerintah                           |        |        |
|     |        |         | Rasio KDRT                           | Kasus  | 20,57% |
|     |        |         | Persentase Pekerja Usia Anak-anak    | Orang  | 5,14%  |
|     |        |         | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Orang  | 54,57% |
|     |        |         | Kasus KDRT                           | Kasus  | 18,14% |

*Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb tahun 2024.*

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb**  
**Tahun 2024**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target  |
|-----|--|--|---------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)     |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat                        | Rata - rata Anak per Keluarga  | 4 orang |
|     |  | Rasio Akseptor KB  | 0,6 %   |
|     |  | Cakupan Peserta KB   | 56,89 % |
|     |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)                                 | 8,54%   |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah                            | 35,30%  |
|     |  | Rasio KDRT   | 20,57%  |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak  | 5,14%   |
|     |  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan   | 54,57%  |
|     |  | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 18,14%  |
| 3   | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah                     | B       |

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb  
Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

**Tabel 2.5**  
**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024**

| No  | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja             | Target  | Jumlah Anggaran | Sumber Dana |
|-----|--|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| (1) | (2)  | (3)                           | (4)     | (5)             | (6)         |
| 1   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | Rata - rata Anak per Keluarga | 4 orang | 330.268.000     | DNF BOKB    |
|     | <b>Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</b>  |                               |         |                 |             |
|     | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   |                               |         |                 |             |
| 2   | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | Rasio Akseptor KB             | 0,6 %   | 15.406.000      | DNF BOKB    |
|     | Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota |                               |         |                 |             |
| 3   | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya                  | Cakupan Peserta KB            | 56,89 % | 105.990.000     | DNF BOKB    |
|     | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   |                               |         |                 |             |
|     | Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota |                               |         |                 |             |

|  |  |   |        |               |         |
|--|--|---|--------|---------------|---------|
|  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  |   |        |               |         |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)      |        |               |         |
|  | <b>Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga</b>   |   | 8,54%  | 1.479.012.391 | OTSUS   |
|  | Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera ) |   |        |               |         |
|  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah |        |               |         |
|  | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>   |   | 35,30% | 191.935.780   | OTSUS   |
|  | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota   |   |        |               |         |
|  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | Rasio KDRT  |        |               |         |
|  | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>   |   | 20,57% | 191.935.780   | OTSUS   |
|  | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota   |   |        |               |         |
|  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>   | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                   | 5,14%  |               | DNF PPA |

|  |   |   |             |             |       |
|--|---|---|-------------|-------------|-------|
|  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |   |             | 142.675.000 |       |
|  | Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota                 |   |             |             |       |
|  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  | 54,57%      | 191.935.780 | OTSUS |
|  | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>  |   |             |             |       |
|  | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota                            |   |             |             |       |
|  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | Penyelesaian an Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 18,14%      | 191.935.780 | OTSUS |
|  | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>  |   |             |             |       |
|  | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota                            |   |             |             |       |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah                        | B<br>18,14% | 26.496.120  | DAU   |
|  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |   |             |             |       |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |   |             |             |       |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Tinggi         | 91 ≤ 100            |
| 2  | Tinggi                | 76 ≤ 90             |
| 3  | Sedang                | 66 ≤ 75             |
| 4  | Rendah                | 51 ≤ 65             |
| 5  | Sangat Rendah         | ≤ 50                |

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja             | Target  | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                 |
|-----|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                           | (4)     | (5)       | (6)       | (7)           | (8)                         |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat | Rata - rata Anak per Keluarga | 4 orang | 4 Orang   | 100%      | Sangat tinggi | Seksi Pengendalian Penduduk |
|     |   | Rasio Akseptor KB             | 0,6 %   | 0,5%      | 83,33%    | Tinggi        | Seksi Keluarga berencana    |
|     |   | Cakupan Peserta KB            | 56,89 % | 51%       | 89,64%    | Tinggi        | Seksi Keluarga berencana    |

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Target  | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                  |
|-----|--|---|---------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)     | (5)       | (6)       | (7)           | (8)                          |
|     |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)      | 8,54 %  | 0,26%     | 3,04%     | Sangat Rendah | Seksi Keluarga Sejahtera     |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 35,30 % | 0,29%     | 0,82%     | Sangat Rendah | Seksi Perlindungan Perempuan |
|     |  | Rasio KDRT  | 20,57 % | 0,1%      | 0,48%     | Sangat Rendah | Seksi Perlindungan Perempuan |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                   | 5,14 %  | 0,17%     | 3,30%     | Sangat Rendah | Seksi Perlindungan Anak      |
|     |  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                | 54,57 % | 0,24%     | 0,43%     | Sangat Rendah | Seksi Perlindungan Perempuan |
|     |  | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan   | 18,14 % | 0,2%      | 1,1%      | Sangat Rendah | Seksi Perlindungan Perempuan |

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data              |
|-----|--|--|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)       | (6)       | (7)      | (8)                      |
|     |  | Anak dari Tindakan Kekerasan                               |        |           |           |          |                          |
| 3   | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | B      | B         | 100%      | Baik     | Bagian Umum dan Keuangan |

Sumber: Sumber dari realisasi keuangan dan capaian program pada bidang .

Uraian penjelasan tabel:

Pelaksanaan Sasaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sudah sesuai Indikator dan juga Target Pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Namun beberapa Indikator masih mempunyai realisasi kecil mengingat tidak semua lokus bisa terjangkau oleh program dinas pemberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan membangun sumber daya manusia butuh waktu yang lama ketimbang pembangunan fisik. Kegiatan yang ada pada dinas pemberdayaan perempuan lebih banyak membangun sumber daya manusia yang tentunya memakan waktu yang cukup lama mengenai pentingnya kesadaran masyarakat tentang ber-KB dan pentingnya pelaporan pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

| No  | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja                                 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 |           |           |
|-----|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|     |  |   | Realisasi     | Realisasi     | Target        | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)           | (5)           | (6)           | (7)       | (8)       |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat  | Rata - rata Anak per Keluarga                     | 4 Orang       | 4 Orang       | 4 orang       | 4 Orang   | 100%      |
|     |  | Rasio Akseptor KB                                 | 0,3%          | 0,4%          | 0,6 %         | 0,5%      | 83,33%    |
|     |  | Cakupan Peserta KB                                | 50%           | 52%           | 56,89 %       | 51%       | 89,64%    |
|     |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)    | 0,30%         | 0,27%         | 8,54%         | 0,26%     | 3,04%     |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerint | 0,20%         | 0,25%         | 35,30%        | 0,29%     | 0,82%     |

| No  | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja                                       | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |           |
|-----|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|     |  |   | Realisasi  | Realisasi  | Target     | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        | (5)        | (6)        | (7)       | (8)       |
|     | ah<br>Rasio KDRT<br>Persentase Pekerja Usia Anak-anak                          | ah  |            |            |            |           |           |
|     |  | Rasio KDRT  | 0,2%       | 0,5%       | 20,57%     | 0,1%      | 0,48%     |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                       | 0,15%      | 0,10%      | 5,14%      | 0,17%     | 3,30%     |
|     | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan   | Partisipasi   |            |            |            |           |           |
|     |  | Angkatan Kerja Perempuan                                | 0,30%      | 0,15%      | 54,57%     | 0,24%     | 0,43%     |
|     | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | Penyelesaian Pengaduan                                  |            |            |            |           |           |
|     |  | Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 0,4%       | 0,5%       | 18,14%     | 0,2%      | 1,1%      |
|     | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan                                  | Nilai hasil evaluasi atas                               | B          | B          | B          | B         | 100%      |

| No  | Tujuan/ Sasaran                        | Indikator Kinerja                | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |           |
|-----|--|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|     |  |                                  | Realisasi  | Realisasi  | Target     | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2)                                    | (3)                              | (4)        | (5)        | (6)        | (7)       | (8)       |
|     | yang Berorientasi pada pelayanan Prima | akuntabilitas kinerja pemerintah |            |            |            |           |           |

### **3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana periode 2021-2025 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No  | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja                         | Realisasi Kinerja Tahun n | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|---|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| (1) | (2)  | (3)                                       | (4)                       | (5)                            | (6)<br>(4/5*100) |
| 1.  | Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana | 87.66%                    | 50%                            | 174%             |
|     |  | Nilai akuntabilitas kinerja OPD           | B                         | B                              | B                |
| 2.  | Peningkatan akses dan kualitas   | Jumlah peserta KB aktif                   | 51%                       | 8,58%                          | 594%             |

| No   | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja          | Realisasi Kinerja Tahun n | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| (1)  | (2)  | (3)                        | (4)                       | (5)                            | (6)<br>(4/5*100) |
| pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat | Jumlah akseptor aktif  | 0,5%                       | 8,580%                    | 5,8%                           |                  |
|  | Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR) | 0%                         | 5                         | 0                              |                  |
|  | Persentase Keluarga Prasejahtera   | 0,26%                      | 35,50%                    | 0,73%                          |                  |
|  | Rasio Akseptor KB  | 0,5%                       | 40%                       | 1,25%                          |                  |
| 3.   | Peningkatan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                   | Indeks Pembangunan Gender  | 0%                        | 50,12%                         | 0                |
|  |  | Indeks Pemberdayaan Gender | 0%                        | 40,20%                         | 0                |
|  |  | Kasus KDRT                 | 0,1%                      | 10                             | 1%               |

Sumber : Dari Bagian Umum dan Keuangan Serta Bidang Pada DPPKB  
Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan antara Rencana Strategis dengan Realisasi kinerja Tahun 2024 Pada Masing-masing indikator Pada Dinas Pemberdayaan Peremuan dan Keluarga Berencana belum mencapai maksimal, hal ini dikarenakan belum bisa menjangkau lokus diseluruh kampung yang ada di kabupaten Asmat dikarenakan keterbatasan Angaran.

### **3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/  
Kabupaten/Kota**

| No  | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja                                   | Realisasi Tahun n | Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain | % Capaian            |
|-----|--|---|-------------------|--|----------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)               | (5)  | (6)<br>(4 / 5 * 100) |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat  | Rata - rata Anak per Keluarga                       | 4 Orang           | 2,68   | 2,68                 |
|     |  | Rasio Akseptor KB                                   | 0,5%              | 73,8   | 0,67                 |
|     |  | Cakupan Peserta KB                                  | 51%               | 73,8   | 69,10                |
|     |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)      | 0,26%             | 0  | 0                    |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 0,29%             | 0  | 0                    |
|     |  | Rasio KDRT  | 0,1%              | 50   | 0,2                  |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                   | 0,17%             | 0  | 0                    |
|     |  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                | 0,24%             | 50   | 0,48                 |
|     |  | Penyelesaiana n Pengaduan Perlindungan              | 0,2%              | 50%  | 0,4                  |

| No           | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja  | Realisasi Tahun n | Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain | % Capaian            |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------|
| (1)          | (2)  | (3)  | (4)               | (5)  | (6)<br>(4 / 5 * 100) |
|              |  | Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan                 |                   |  |                      |
| <sup>3</sup> | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | B                 | BB   | BB                   |

Sumber :Sumber dari BKKBN Perwakilan Provinsi Papua dan Juga Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Selatan.

### **3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

| No  | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja                                   | Target  | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan  | Solusi yang dilakukan  |
|-----|--|---|---------|-----------|-----------|--|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)     | (5)       | (6)       | (7)  | (8)  |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat  | Rata - rata Anak per Keluarga                       | 4 orang | 4 Orang   | 100%      | Keberhasilan indikator ini di karenakan didukung oleh Tim Pendamping Keluarga yang ada di setiap Kampung.              | Lebih sering lagi sosialisasi tentang jarak angka kelahiran per keluarga |
|     |  | Rasio Akseptor KB                                   | 0,6 %   | 0,5%      | 83,33%    | Keberhasilan ini dikarenakan sudah mulainya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi                    | Dukungan agar masyarakat memiliki konsistensi kesadaran yang tinggi.     |
|     |  | Cakupan Peserta KB                                  | 56,89 % | 51%       | 89,64%    | Cakupan penggunaan alat kontrasepsi mulai meluas dikalangan masyarakat.  | Lebih sering diadakan penyuluhan tentang KB                              |
|     |  | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)      | 8,54%   | 0,26%     | 3,04%     | Keberhasilan dikarenakan Sudah adanya bantuan dari anggaran Otsus untuk Peningkatan usaha kecil masyarakat Asli Papua. | Lebih sering pendampingan kelompok untuk peningkatan pendapatan          |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 35,30%  | 0,29%     | 0,82%     | Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sudah semakin baik  | Harus sering adanya edukasi kepada perempuan khususnya OAP               |
|     |  | Rasio KDRT  | 20,57%  | 0,1%      | 0,48%     | Kurangnya Kesadaran tentang pelaporan KDRT   | Lebih sering diadakan penyuluhan KDRT                                    |

| No  | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan  | Solusi yang dilakukan  |
|-----|--|--|--------|-----------|-----------|--|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)       | (6)       | (7)  | (8)  |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak  | 5,14%  | 0,17%     | 3,30%     | Masih kurangnya kesadaran anak tentang pendidikan  | Lebih sering lagi diadakan pendekatan tentang pentingnya pendidikan bagi anak -anak      |
|     |  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan   | 54,57% | 0,24%     | 0,43%     | Kurangnya Lapangan Kerja khususnya bagi perempuan Asmat  | Adanya pembukaan lapangan kerja khususnya bagi perempuan Asmat                           |
|     |  | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 18,14% | 0,2%      | 1,1%      | Pelaporan kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah baus tapi harus di tingkatkan kembali        | Lebih sering diadakan penyuluhan tentang bahaya tindak kekerasan bagi anak dan perempuan |
| 3   | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah                     | B      | B         | 100%      | Keberhasilan Evaluasi akuntabilitas harusn semakin baik guna perbaikan pemerintahan yang akuntabel | Lebih sering lagi adanya pelatihan tentang akuntabilisasi pelaporan.                     |

Sumber : Sumber dari Seksi Pengendalian Penduduk dan juga Bidang Pada DPPKB

Uraian penjelasan tabel :

Keberhasilan Indikator tergantung pada penambahan anggran dan juga kesadaran masyarakat. Namun terkadang ada kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat kurang berhasilnya indikator tersebut walaupun sudah didukung oleh anggran yang mencukupi.

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran   | Indikator Kinerja |           |           | Anggaran      |               |           | Efisiensi   |  |
|-----|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
|     |  | Target            | Realisasi | % Capaian | Anggaran      | Realisasi     | % Capaian |             |  |
|     |  |                   |           |           | (Rp.)         | (Rp.)         |           |             |  |
| (1) | (2)  | (3)               | (4)       | (5)       | (6)           | (7)           | (8)       | (9)         |  |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat                        | 56,89 %           | 10,40%    | 18,28     | 5.476.197.655 | 5.394.604.980 | 98,51     | 81,592,675  |  |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | 18,14%            | 2,26%     | 12,45     | 191.935.780   | 184.125.531   | 95,93     | 7,810,249   |  |
| 3   | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | B                 | B         | 100       | 4.982.444.505 | 4.367.520.572 | 87,66     | 614,923,933 |  |

Sumber : Sumber dari realisasi keuangan dan juga dari bidang pelaksana kegiatan  
Uraian penjelasan tabel:

Pelaksanaan Kegiatan sudah mencakup sasaran dan target namun tidak semua lokus tercukupi mengingat keterbatasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

### **3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**

#### **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No  | Tujuan/ Sasaran   | Indikator Kinerja             | Capaian % | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja             | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis                                    |
|-----|---|-------------------------------|-----------|---|-------------------------------|-----------|----------------------------|---|
| (1) | (2)   | (3)                           | (4)       | (5)   | (6)                           | (7)       | (8)                        | (9)   |
| 1   | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat | Rata - rata Anak per Keluarga | 100%      | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  | Rata - rata Anak per Keluarga | 100%      | Menunjang                  | Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut |
|     |   | Rasio Akseptor KB             | 83,33%    | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya | Rasio Akseptor KB             | 83,33%    | Menunjang                  | Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut |
|     |   | Cakupan Peserta KB            | 89,64%    | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                   | Cakupan Peserta KB            | 89,64%    | Menunjang                  | Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut |
|     |   | Tingkat kemiskinan (Pra       | 3,04%     | Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan                                   | Tingkat kemiskinan (Pra       | 3,04%     | Menunjang                  | Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut |

| No  | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja                                   | Capaian % | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis                                   |
|-----|--|---|-----------|--|---|-----------|----------------------------|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)       | (5)  | (6)   | (7)       | (8)                        | (9)  |
|     |  | sejahtera + Sejahtera)                              |           | Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera )               | sejahtera + Sejahtera)                              |           |                            |  |
| 2   | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 0,82%     | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota           | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 0,82%     | Menunjang                  | Sudah Sesuai Output dari Kegiatan Tersebut |
|     |  | Rasio KDRT  | 0,48%     | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota           | Rasio KDRT  | 0,48%     | Menunjang                  | Sudah Sesuai Output dari Kegiatan Tersebut |
|     |  | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                   | 3,30%     | Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan pelindungan anak kewenangan kabupaten/kota | Persentase Pekerja Usia Anak-anak                   | 3,30%     | Menunjang                  | Sudah Sesuai Output dari Kegiatan Tersebut |
|     |  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                | 0,43%     | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota           | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                | 0,43%     | Menunjang                  | Sudah Sesuai Output dari Kegiatan Tersebut |
|     |  | Penyelesaian Pengaduan                              | 1,1%      | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan                                     | Penyelesaian Pengaduan                              | 1,1%      | Menunjang                  | Sudah Sesuai Output dari Kegiatan Tersebut |

| No  | Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja  | Capaian % | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis                                    |
|-----|--|--|-----------|---|--|-----------|----------------------------|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)       | (5)   | (6)  | (7)       | (8)                        | (9)   |
|     |  | Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan    |           | kewenangan kabupaten/kota                                   | Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan    |           |                            |   |
| 3   | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | 100%      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | 100%      | Menunjang                  | Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut |

Sumber : Dari Realisasi Keuangan dan Bidang pengampu kegiatan

Uraian penjelasan tabel :

Indikator dari masing –masing kegiatan sudah sesuai untuk mengukur apakah kegiatan tersebut sudah berhasil atau pun belum.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2  
Belanja Anggaran**

| <b>No</b> | <b>Jenis</b>               | <b>Pagu<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1         | Belanja Operasional        | 14.188.241.719       | 13.403.986.634            |
|           | a. Belanja Pegawai         | 4.047.028.772        | 3.686.308.318             |
|           | b. Belanja Barang dan Jasa | 10.141.212.947       | 9.717.678.316             |
| 2         | Belanja Modal              | 516.580.000          | 516.199.585               |

**Tabel 3.3**  
**Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 10 Tahun 2025 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB ) Tahun 2024**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja                              | Capaian (%) | Program Utama   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|---|--|-------------|---|---------------|----------------|-------------|
| 1  | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat | Rata - rata Anak per Keluarga                  | 100%        | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  |               |                |             |
|    |   |  |             | <b>Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</b>   |               |                |             |
|    |   |  |             | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  | 330.268.000   | 328.295.607    | 99.40       |
|    |   | Rasio Akseptor KB                              | 83,33%<br>8 | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  |               |                |             |
|    |   |  |             | <b>Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota</b> |               |                |             |
|    |   |  |             | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya                         | 15.406.000    | 15.387.200     | 99.88       |
|    |   |  |             | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  |               |                |             |
|    |   | Cakupan Peserta KB                             | 89,64%      | <b>Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota</b> |               |                |             |
|    |   |  |             | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 105.990.000   | 87.586.594     | 82.64       |
|    |   |  |             | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   |               |                |             |
|    |   | Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera) | 3,04%       | <b>Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan</b>   |               |                |             |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja                                   | Capaian (%) | Program Utama   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|---|-------------|---|---------------|----------------|-------------|
|    |  |   |             | <b>keluarga</b>   |               |                |             |
|    |  |   |             | Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera) | 1.479.012.391 | 1.476.894.787  | 99.86       |
| 2  | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 0,82%       | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   |               |                |             |
|    |  |   |             | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>  |               |                |             |
|    |  |   |             | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota  | 191.935.780   | 184.125.531    | 95.93       |
|    |  | Rasio KDRT  | 0,48%       | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   |               |                |             |
|    |  |   |             | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>  |               |                |             |
|    |  |   |             | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota  | 191.935.780   | 184.125.531    | 95.93       |
|    |  | Percentase Pekerja Usia Anak-anak                   | 3,30%       | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  |               |                |             |
|    |  |   |             | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |               |                |             |
|    |  |   |             | Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten kota   | 142.675.000   | 142.625.992    | 99.97       |
|    |  | Partisipasi Angkatan                                | 0,43%       | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   |               |                |             |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Capaian (%) | Program Utama  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|--|-------------|--|---------------|----------------|-------------|
|    |  | Kerja Perempuan  |             | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>                 |               |                |             |
|    |  |  |             |  |               |                |             |
|    |  |  |             | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota | 191.935.780   | 184.125.531    | 95.93       |
|    |  | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 1,1%        | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  |               |                |             |
|    |  |  |             | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>                 |               |                |             |
|    |  |  |             | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota | 191.935.780   | 184.125.531    | 95.93       |
| 3  | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah                     | 100         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           |               |                |             |
|    |  |  |             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      |               |                |             |
|    |  |  |             | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 26.496.120    | 26.480.238     | 99.94       |

**Tabel 3.4**  
**Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024**

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Input                |                      |             | Output  |        |           |             | Nilai Capaian Program/<br>Kegiatan |
|----|---|----------------------|----------------------|-------------|---------|--------|-----------|-------------|------------------------------------|
|    |   | Target<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)    | Capaian (%) | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian (%) |                                    |
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            | <b>4.982.444.505</b> | <b>4.367.520.572</b> | 87.66       |         |        |           |             |                                    |
|    | <b>Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>         | <b>26.496.120</b>    | <b>26.480.238</b>    | 99.94       |         |        |           |             |                                    |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.496.120           | 26.480.238           | 99.94       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                                |
| 2  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>4.072.328.772</b> | <b>3.711.551.237</b> | 91.14       |         |        |           |             |                                    |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.047.028.772        | 3.686.308.318        | 91.09       | Orang   | 30     | 30        | 100         | 100                                |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 25.300.000           | 25.242.919           | 99.77       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                                |
| 3  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>138.069.007</b>   | <b>127.854.007</b>   | 92.60       |         |        |           |             |                                    |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 24.206.000           | 21.535.000           | 88.97       | Paket   | 20     | 20        | 100         | 100                                |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 61.144.007           | 61.144.007           | 100         | Paket   | 50     | 50        | 100         | 100                                |
|    | Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan   | 52.719.000           | 45.175.000           | 85.69       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                                |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Input               |                    |             | Output  |        |           | Nilai Capaian Program/ Kegiatan |
|----|--|---------------------|--------------------|-------------|---------|--------|-----------|---------------------------------|
|    |  | Target (Rp)         | Realisasi (Rp)     | Capaian (%) | Satuan  | Target | Realisasi |                                 |
| 4  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>734.548.606</b>  | <b>490.985.000</b> | 66.84       |         |        |           |                                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 4.500.000           | 4.500.000          | 100         | Laporan | 1      | 1         | 100                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 39.048.606          | 32.195.000         | 82.45       | Laporan | 1      | 1         | 100                             |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 691.000.000         | 454.290.000        | 65.74       | Orang   | 26     | 26        | 100                             |
| 5  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>11.000.000</b>   | <b>10.650.000</b>  | 96.82       |         |        |           |                                 |
|    | Pemelihraaan Peralatan dan Mesin lainnya   | 11.000.000          | 10.650.000         | 96.82       | Unit    | 20     | 20        | 100                             |
| 6  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | <b>191.935.780</b>  | <b>184.125.531</b> | 95.93       |         |        |           |                                 |
|    | <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>   | <b>191.935.7808</b> | <b>184.125.531</b> | 95.93       |         |        |           |                                 |
|    | Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota                               | 191.935.780         | 184.125.531        | 95.93       | Orang   | 150    | 150       | 100                             |
| 7  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>   | <b>340.672.918</b>  | <b>340.422.323</b> | 99.93       |         |        |           |                                 |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>    | <b>142.675.000</b>  | <b>142.625.992</b> | 99.97       |         |        |           |                                 |
|    | Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan pelindungan anak kwewnangan kabupaten/kota                     | 142.675.000         | 142.625.992        | 99.97       | Orang   | 100    | 100       | 100                             |
| 8  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peneingkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak</b> | <b>197.997.918</b>  | <b>197.796.331</b> | 99.90       |         |        |           |                                 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Input                |                      |             | Output  |        |           | Nilai Capaian Program/ Kegiatan |     |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------|---------|--------|-----------|---------------------------------|-----|
|    |  | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | Capaian (%) | Satuan  | Target | Realisasi |                                 |     |
|    | Peningkatan Kapasitas Penyedia Sumber daya Penyedia layanan Peningkatan Kulitas Keluarga Tingkat Daerah/Kota   | 197.997.918          | 197.796.331          | 99.90       | Layanan | 10     | 10        | 100                             | 100 |
| 9  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | <b>330.268.000</b>   | <b>328.295.607</b>   | 99.40       |         |        |           |                                 |     |
|    | <b>Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</b>  | <b>330.268.000</b>   | <b>328.295.607</b>   | 99.40       |         |        |           |                                 |     |
|    | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | 330.268.000          | 328.295.607          | 99.40       | Laporan | 1      | 1         | 100                             | 100 |
| 10 | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | <b>5.476.197.655</b> | <b>5.394.604.980</b> | 98.51       |         |        |           |                                 |     |
|    | <b>Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</b>                                 | <b>1.928.230.655</b> | <b>1.868.123.671</b> | 96.88       |         |        |           |                                 |     |
|    | Advokasi Program KKBPK,Kepada SteakHolder,dan Mitra Kerja  | 195.282.000          | 169.233.829          | 86.66       | Laporan | 1      | 1         | 100                             | 100 |
|    | Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan  | 100.000.000          | 98.747.208           | 98.75       | Laporan | 1      | 1         |                                 |     |
|    | Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa ( rakordes), dan mini lokakarya (minilok) | 363.030.241          | 361.071.526          | 99.46       | Laporan | 23     | 23        | 100                             | 100 |
|    | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK   | 126.411.000          | 118.781.837          | 93.96       | Unit    | 3      | 3         | 100                             | 100 |
|    | Pengendalian Program KKBPK   | 1.143.507.414        | 1.120.289.271        | 97.97       | Laporan | 1      | 1         | 100                             | 100 |
| 11 | <b>Pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | <b>662.975.000</b>   | <b>662.920.478</b>   | 99.99       |         |        |           |                                 |     |
|    | Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | 662.975.000          | 662.920.478          | 99.99       | Laporan | 1      | 1         | 100                             | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Input                |                      |             | Output  |        |           |             | Nilai Capaian Program/ Kegiatan |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------|---------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|
|    |  | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | Capaian (%) | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian (%) |                                 |
| 12 | <b>Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota</b>                                | <b>2.021.348.000</b> | <b>2.001.945.564</b> | 99.04       |         |        |           |             |                                 |
|    | Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya                  | 1.899.952.000        | 1.898.971.770        | 99.95       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                             |
|    | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 105.990.000          | 87.586.594           | 82.64       | Orang   | 30     | 30        | 100         | 100                             |
|    | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya  | 15.406.000           | 15.387.200           | 99.88       | Orang   | 30     | 30        | 100         | 100                             |
| 13 | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | <b>863.644.000</b>   | <b>861.615.267</b>   | 99.77       |         |        |           |             |                                 |
|    | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  | 3.762.000            | 3.743.800            | 99.52       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                             |
|    | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat (DASHAT) dikampung Keluarga Berkualitas   | 562.625.000          | 561.041.680          | 99.72       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                             |
|    | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana dikampungg Berkualitas  | 297.257.000          | 296.829.787          | 99.86       | Laporan | 1      | 1         | 100         | 100                             |
| 14 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b>3.383.302.861</b> | <b>3.248.566.497</b> | 96.02       |         |        |           |             |                                 |
|    | <b>Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>   | <b>1.792.102.861</b> | <b>1.789.966.497</b> | 99.88       |         |        |           |             |                                 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Input                |                      |             | Output   |        |           |             | Nilai Capaian Program/ Kegiatan |
|----|---|----------------------|----------------------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|
|    |   | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | Capaian (%) | Satuan   | Target | Realisasi | Capaian (%) |                                 |
|    | Pengadaan Saranan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi /UPKKS)                                     | 313.080.470          | 313.071.710          | 100.00      | Unit     | 25     | 25        | 100         | 100                             |
|    | Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera )    | 1.479.012.391        | 1.476.894.787        | 99.86       | Kelompok | 10     | 10        | 100         | 100                             |
| 15 | <b>Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembngunan Keluarga Melalui Ketahanan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>1.591.200.000</b> | <b>1.458.600.000</b> | 91.67       |          |        |           |             |                                 |
|    | Pemantauan Data Beresiko Stunting   | 663.000.000          | 585.000.000          | 88.24       | Orang    | 663    | 585       | 88,24       | 88,24                           |
|    | Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting   | 928.000.000          | 873.600.000          | 94.14       | Orang    | 663    | 624       | 94,14       | 94,14                           |

Uraian penjelasan tabel:

Program ,kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksananya semua dan mencapai realisasi rata-rata hampr 100% dan juga capaian Output juga mendekati 100%, hal ini terjadi memank jadwal sudah sesuai dengan perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan. Selain itu juga dinas pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Memang mempunyai 2 urusan diantaranya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki 3 sasaran strategis dengan 3 sasaran strategis tercapai Semua.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah, Masih rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengikuti program KB, Masih kurangnya tenaga penyuluhan KB di setiap Distrik dan Kampung, Masih rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan di Asmat, dan Masih Adanya ancaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan 1.
2. Rekomendasi langkah perbaikan 2.
3. Rekomendasi langkah perbaikan 3.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .





**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat: Jl Frans Kaisiepo Agats Telp/Fax: ( 0902 32191) Kode Pos: 99777

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN ASMAT**  
**NOMOR : 050/05/DPPKB/I/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat yang berorientasi pada hasil (outcame);  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rangcangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M. Umum PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Praturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat;
14. Peraturan Bupati Asmat Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Infomasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats  
Pada tanggal : 15 Januari 2024  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KB**

  
**MARGARETHA WABISER, SE**  
PEMBINA  
Nip. 19780604 200502 2 004

Lampiran Keputusan Kepala DPPKB  
 Nomor : 050/05/DPPKB/I/2024  
 Tanggal : 15 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB**

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                                   | FORMULASI   | SUMBER DATA   | PENANGGUNG JAWAB                                    |
|--|--|---|---|---|---|
| Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat  | Rata-rata Anak per Keluarga                         | Jumlah Anak yang dilahirkan per Keluarga  | Aplikasi Sistem Infirmasi Keluarga (SIGA)           | Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana     |
|  |  | Rasio Akseptor KB                                   | Pengukuran kuantitatif dari jumlah individu atau pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) | Aplikasi Sistem Infirmasi Keluarga (SIGA)           | Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana            |
|  |  | Cakupan Peserta KB Aktif                            | Jumlah peserta KB aktif dari setiap pasangan usia subur   | Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA)           | Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana            |
|  |  | Tingkat Kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)      | Peningkatan Kesejahteraan Keluarga  | Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera | Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera |
| Meningkatkan Pengarusutamaan Gender                          | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | Peningkatan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah   | Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera        | Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera |
|  |  | Rasio KDRT  | Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam   | Aplikasi Simponi Kementerian                        | Bidang Perlindungan                                 |

|   |  |   | periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga              | Perlindungan Perempuan dan Anak               | Perempuan dan Anak                             |
|---|--|---|--|---|--|
|   | Persentase pekerja Usia anak -anak   | Peningkatan pekerja anak usia 5-14 tahun dan jumlah pekerja usia 5 tahun keatas | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak                     | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak        | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak         |
|   | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan   | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan                                     | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak                     | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak        | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak         |
|   | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan         | Prosedur penanganan pengaduan langsung dan tidak langsung                       | Aplikasi Simponi Kementrian Perlindungan Peremuan dan Anak | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak        |  |
| Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang professional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah                      | Penilaian Inspektorat atas laporan Kinerja OPD             | Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten. | Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB |

Ditetapkan di : Agats  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KB

MARGARETHA WABISER, SE  
PEMBINA  
NIP. 19780604 200502 2 004





**PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA**  
**BERENCANA KABUPATEN ASMAT**  
**KEPALA DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARGARETHA WABISER, SE**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELISA KAMBU, S. Sos**

Jabatan : **Bupati Asmat**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Agats, 15 Januari 2024



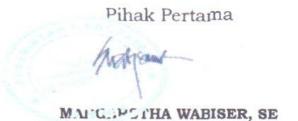
**MARGARETHA WABISER, SE**  
NIP. 19780604 200502 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target  |
|----|--|--|---------|
| 1. | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat                        | 1. Rata - rata Anak per Keluarga                               | 4 orang |
|    |  | 2. Rasio Akseptor KB   | 0,6 %   |
|    |  | 3. Cakupan Peserta KB  | 56,89 % |
|    |  | 4. Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)              | 8,54%   |
|    |  | 5. Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah         | 35,30%  |
|    |  | 6. Rasio KDRT  | 20,57%  |
|    |  | 7. Persentase Pekerja Usia Anak-anak                           | 5,14%   |
|    |  | 8. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                        | 54,57%  |
|    |  | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan                            |         |
|    |  | 9. Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan                  | 18,14%  |
| 3. | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | 10. Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | B       |

| Program   | Anggaran              | Keterangan  |
|---|-----------------------|-------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 5,027,363,831         | APBD        |
| 2. Program Perlindungan Perempuan                                 | 191,935,780           | APBD        |
| 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga                          | 197,997,918           | APBD        |
| 4. Program Pengendalian Penduduk                                  | 160,200,000           | APBD        |
| 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )                    | 5,556,960,420         | APBD        |
| 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS ) | 3,270,721,250         | APBD        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14,405,179,199</b> | <b>APBD</b> |

Agats, 15 Januari 2024





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA**  
**BERENCANA KABUPATEN ASMAT**  
**KEPALA DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARGARETHA WABISER, SE**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELISA KAMBU, S. Sos**  
Jabatan : **Bupati Asmat**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Agats, 20 September 2024



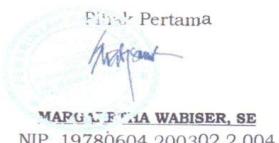
Pihak Pertama  
  
**MARGARETHA WABISER, SE**  
NIP. 19780604 200502 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target  |
|----|--|--|---------|
| 1. | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat                        | 1. Rata - rata Anak per Keluarga                               | 4 orang |
|    |  | 2. Rasio Akseptor KB   | 0,6 %   |
|    |  | 3. Cakupan Peserta KB  | 56,89 % |
|    |  | 4. Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)              | 8,54%   |
|    | Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | 5. Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah         | 35,30%  |
|    |  | 6. Rasio KDRT  | 20,57%  |
|    |  | 7. Persentase Pekerja Usia Anak-anak                           | 5,14%   |
|    |  | 8. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                        | 54,57%  |
|    |  | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan                            |         |
|    |  | 9. Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan                  | 18,14%  |
| 3. | Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima | 10. Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah | B       |

| Program   | Anggaran              | Keterangan  |
|---|-----------------------|-------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 4,982,444,505         | APBD        |
| 2. Program Perlindungan Perempuan                                 | 191,935,780           | APBD        |
| 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga                          | 340,672,918           | APBD        |
| 4. Program Pengendalian Penduduk                                  | 330,268,000           | APBD        |
| 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )                    | 5,476,197,655         | APBD        |
| 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS ) | 3,383,302,861         | APBD        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14,704,821,719</b> | <b>APBD</b> |

Agats, 20 September 2024



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

| Kode               | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan (output)              | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |
|--------------------|---|---|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
|                    |   |   | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan       |                | Tahun 2021                                  |                | Tahun 2022                                  |                | Tahun 2023                                  |                | Tahun 2024                                  |                | Tahun 2025                                  |
| Kinerja            | Rp.Juta   | Kinerja   | Rp.Juta  | Kinerja        | Rp.Juta                                     | Kinerja        | Rp.Juta                                     | Kinerja        | Rp.Juta                                     | Kinerja        | Rp.Juta                                     | Kinerja        | Rp.Juta                                     |
| 2.08.01            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 5.693.321.630;                                 | 6.615.000.000; | 6.345.000.000;                              | 5.601.000.000; | 7.204.075.000;                              | ;              | ;   | ;              | ;   | ;              | ;   |
| 2.08.01.2.01       | Koordinasi, Pengawas, dan Dukungan  | Terdapat Penyampaian Dokumen Peraturan Daerah yang jelas dan lengkap. | 19.000.000;                                    | 60.000.000;    | 60.000.000;                                 | 60.000.000;    | 60.000.000;                                 | 60.000.000;    | 60.000.000;                                 | 60.000.000;    | 60.000.000;                                 | 60.000.000;    | 60.000.000;                                 |
| 2.08.01.2.01.01    | Koordinasi dan Pengawas, Dukungan BPK, SPPD   | Terdapat Penyampaian Dokumen Peraturan Daerah yang jelas dan lengkap. | 5 Dokumen                                      | 2 Dokumen      | 1 Dokumen                                   | 20.000.000;    | 1 Dokumen                                   |
| 2.08.01.2.01.02    | Koordinasi dan Pengawas, Dukungan BPK, SPPD   | Terdapat Koordinasi dan Pengawas, Dukungan BPK, SPPD                  | 5 Dokumen                                      | 5 Dokumen      | 1 Dokumen                                   | 20.000.000;    | 1 Dokumen                                   |
| 2.08.01.2.01.02.03 | Koordinasi dan Pengawas, Dukungan BPK, SPPD   | Terdapat Koordinasi dan Pengawas, Dukungan BPK, SPPD                  | 5 Dokumen                                      | 5 Dokumen      | 1 Dokumen                                   | 20.000.000;    | 1 Dokumen                                   |
| 2.08.01.2.02       | Administrasi Keuangan Pemilik Daerah  | Terdapat Koordinasi dan Pengawas, Dukungan BPK, SPPD                  | 5 Dokumen                                      | 5 Dokumen      | 1 Dokumen                                   | 20.000.000;    | 1 Dokumen                                   |
| 2.08.01.2.02.01    | Penyampaian Catatan Tunjangan ASN   | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN                            | 175 Orang ASN                                  | 35 Orang ASN   | 35 Orang / ASN                              | 4.539.280.194; | 4.630.000.000;                              | 4.685.000.000; | 4.750.000.000;                              | 4.815.000.000; | 4.880.000.000;                              | 4.945.000.000; | 5.010.000.000;                              |
| 2.08.01.2.02.01.05 | Koordinasi dan Pengawas, Dukungan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun Kuartal Akhir Tahun SPPD | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN                            | 10 Laporan                                     | 19.000.000;    | 2 Laporan                                   | 30.000.000;    | 2 Laporan                                   | 35.000.000;    | 2 Laporan                                   | 35.000.000;    | 2 Laporan                                   | 35.000.000;    | 2 Laporan                                   |
| 2.08.01.2.03       | Administrasi Umum Pemilik Daerah  | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN                            | 428.399.231;                                   | 483.995.128    | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN  | 870.000.000;   | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN  | 70.000.000;    | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN  | 70.000.000;    | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN  | 70.000.000;    | Terdapat Penyampaian Catatan Tunjangan ASN  |
| 2.08.01.2.03.01    | Penyampaian penilaian rumah tangga  | Terdapat Penyampaian penilaian rumah tangga                           | 5.1 Juta                                       | 1.192.000      | Terdapat Penyampaian penilaian rumah tangga |
| 2.08.01.2.03.04    | Penerusan Bahan Logistik Kantor   | Terdapat Penyampaian Bahan Logistik Kantor                            | Akt. milik dan milik pihak ketiga              | 07.524.103;    | 60.000.000;                                 | 60.000.000;    | 60.000.000;                                 | 65.300.000;    | 65.300.000;                                 | 65.300.000;    | 65.300.000;                                 | 65.300.000;    | 65.300.000;                                 |

Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan  
Sosial

2021 - 2025

Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ambarawa  
2021 - 2025

|                 |  |  |                           |               |                           |                 |                |                 |               |                           |                    |                 |               |
|-----------------|--|--|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 2.08.01.2.01.01 | Koordinasi dan sinergitas perumusan kebijakan pelaksanaan PUG  | Terkaitan Koordinasi dan sinergitas perumusan kebijakan pelaksanaan PUG  | Agrit. Jayapura, Semarang |               | Agrit. Jayapura, Semarang | 135.000.000,-   |                |                 |               | Agrit. Jayapura, Semarang | 135.000.000,-      |                 |               |
| 2.08.01.2.01.03 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPNG  | Terkaitan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPNG  | Agrit. Jayapura, Semarang |               | Agrit. Jayapura, Semarang | 135.000.000,-   |                |                 |               | Agrit. Jayapura, Semarang | 135.000.000,-      |                 |               |
| 2.08.01.2.01.04 | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPNG  | Terkaitan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPNG  | Agrit. Jayapura, Semarang |               | Agrit. Jayapura, Semarang | 135.000.000,-   |                |                 |               | Agrit. Jayapura, Semarang | 135.000.000,-      |                 |               |
| 2.08.02.2.02    | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat kewenangan Kabupaten/kota             |  |                           |               |                           |                 | 150.000.000,-  |                 | 150.000.000,- |                           | 150.000.000,-      |                 |               |
| 2.08.02.2.02.02 | Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum sosial dan ekonomi            | Terkaitan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum sosial dan ekonomi            | 23 Distrik                |               | 5 Distrik                 |                 | Distrik Agrit. | 150.000.000,-   | Distrik Asy.  | 150.000.000,-             | Distrk. Sanc. Lema | 150.000.000,-   |               |
| 2.08.02.2.03    | Pengurusan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota                  |  |                           | 512.116.000,- | 200.000.000,-             | 500.000.000,-   |                | 450.000.000,-   |               | 450.000.000,-             |                    |                 |               |
| 2.08.02.2.03.01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Terkaitan Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Organisasi                | 17 Organisasi | 218.612.000,-             | 5 Distrik       |                | 8 Distrik       | 200.000.000,- | 5 Distrik                 | 150.000.000,-      | 5 Distrik       | 150.000.000,- |
| 2.08.02.2.03.02 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota          | Terkaitan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota          | 23 Distrik                | 253.504.000,- | 8 Distrik                 | 100.000.000,-   | 5 Distrik      | 200.000.000,-   | 5 Distrik     | 200.000.000,-             | 5 Distrik          | 200.000.000,-   |               |
| 2.08.02.2.03.03 | Pengembangan komunikasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota                                   | Terkaitan Pengembangan komunikasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota                                   | 23 Distrik                |               | 5 Distrik                 | 100.000.000,-   | 5 Distrik      | 100.000.000,-   | 5 Distrik     | 100.000.000,-             | 5 Distrik          | 100.000.000,-   |               |
| 2.08.04         | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  |  |                           | 673.086.425,- | 928.077.345,-             | 1.100.000.000,- |                | 1.000.000.000,- |               | 1.000.000.000,-           |                    | 1.000.000.000,- |               |
| 2.08.04.2.01    | Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota       |  |                           | 419.532.425,- | 200.000.000,-             | 400.000.000,-   |                | 600.000.000,-   |               | 600.000.000,-             |                    | 600.000.000,-   |               |
| 2.08.04.2.01.01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan hak anak di tingkat daerah kabupaten/kota     | Terkaitan Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan hak anak di tingkat daerah kabupaten/kota     | 23 Distrik                |               |                           |                 | 7 Distrik      | 200.000.000,-   | 7 Distrik     | 200.000.000,-             | 7 Distrik          | 200.000.000,-   |               |
| 2.08.04.2.01.02 | Pelatihan komunikasi informasi edukasi dan keluarga gender dan perlindungan bagi keluarga kewenangan/kota              | Terkaitan Pelatihan komunikasi informasi edukasi dan keluarga gender dan perlindungan bagi keluarga kewenangan/kota              | 23 Distrik                |               |                           |                 | 11 Distrik     | 200.000.000,-   | 11 Distrik    | 200.000.000,-             | 11 Distrik         | 200.000.000,-   |               |
| 2.08.04.2.01.03 | Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota                         | Terkaitan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota                         | 23 Distrik                | 416.532.425,- | 5 Distrik                 | 200.000.000,-   | 5 Distrik      | 200.000.000,-   | 5 Distrik     | 200.000.000,-             | 5 Distrik          | 200.000.000,-   |               |

*Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Amat  
2021 - 2025*

|                 |   |   |            |               |                         |               |                |               |                |               |                |               |               |
|-----------------|---|---|------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 2.08.04.2.02    | Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wajah                       |   |            | 233.504.000-  | 628.877.343,-           |               | 600.000.000,-  |               | 600.000.000,-  |               | 600.000.000,-  |               |               |
| 2.08.04.2.02.01 | Adroitas kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota           | Terlaksanya Adroitas kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota           | 21 Distrik |               | Demik Agus              | 200.000.000,- | 6 Distrik      | 200.000.000,- | 5 Distrik      | 200.000.000,- | 5 Distrik      | 200.000.000,- |               |
| 2.08.04.2.02.02 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota                       | Terlaksanya Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota                       | 21 Distrik | J Distrik     | 233.504.000-            | 5 Distrik     | 128.877.343,-  | 5 Distrik     | 200.000.000,-  | 5 Distrik     | 200.000.000,-  | 5 Distrik     | 200.000.000,- |
| 2.08.04.2.02.03 | Pengurangan jarak antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota                                    | Terlaksanya Pengurangan jarak antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota                                    | 21 Distrik |               | 6 Distrik               | 500.000.000,- | 5 Distrik      | 200.000.000,- | 5 Distrik      | 200.000.000,- | 5 Distrik      | 200.000.000,- |               |
| 2.08.04.2.03    | Penyedia Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wajah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota                                 |   |            |               | 100.000.000,-           |               | 100.000.000,-  |               | 300.000.000,-  |               | 300.000.000,-  |               |               |
| 2.08.04.2.03.01 | Pelaksanaan penyedia layanan komperensi bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wajah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksanya Pelaksanaan penyedia layanan komperensi bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wajah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota | 21 Distrik |               | 5 Distrik               | 100.000.000,- | 3 Distrik      | 100.000.000,- | 8 Distrik      | 100.000.000,- | 8 Distrik      | 100.000.000,- |               |
| 2.08.05         | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK   |   |            |               |                         | 200.000.000,- |                | 200.000.000,- |                | 200.000.000,- |                | 200.000.000,- |               |
| 2.08.05.2.01    | Pengumpulan pengolahan analisa dan perayaan dan gender dan anak dalam keterwujudan data di tingkat daerah kabupaten/kota                        |   |            |               |                         | 200.000.000,- |                | 200.000.000,- |                | 200.000.000,- |                | 200.000.000,- |               |
| 2.08.05.2.01.01 | Penyedia Data Gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota  | Terlaksanya Penyedia Data Gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota  | 21 Distrik |               | Cabupaten Amat          | 100.000.000,- | Kabupaten Amat | 100.000.000,- | Kabupaten Amat | 100.000.000,- | Kabupaten Amat | 100.000.000,- |               |
| 2.08.05.2.01.02 | Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam keterwujudan data di kewenangan kabupaten/kota   | Terlaksanya Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam keterwujudan data di kewenangan kabupaten/kota   | 21 Distrik |               | Kabupaten Amat          | 100.000.000,- | Kabupaten Amat | 100.000.000,- | Kabupaten Amat | 100.000.000,- | Kabupaten Amat | 100.000.000,- |               |
| 2.08.03         | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  |   |            | 601.310.000,- | 590.000.000,-           | 700.000.000,- |                | 600.000.000,- | 400.000.000,-  | 400.000.000,- | 400.000.000,-  |               |               |
| 2.08.03.2.01    | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota   |   |            | 372.100.000,- | 700.000.000,-           | 400.000.000,- |                | 400.000.000,- | 200.000.000,-  | 200.000.000,- | 200.000.000,-  |               |               |
| 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pengawahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota    | Terlaksanya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pengawahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota    | 21 Distrik | 17 Distrik    | 5 Distrik dan 7 Kampung | 350.000.000,- | 7 Distrik      | 200.000.000,- | 7 Distrik      | 200.000.000,- | 7 Distrik      | 200.000.000,- |               |

Rencana Strategis  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang  
 2021 - 2025

|                 |  |  |            |            |             |                         |             |           |             |                         |             |           |             |
|-----------------|--|--|------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 2.08.03.2.01.02 | Aduktif kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan kabupaten/kota  | Terlaksananya Aduktif kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan kabupaten/kota  | 23 Distrik |            |             | 5 Distrik dan 5 kampung | 150.000.000 | 7 Distrik | 200.000.000 | 7 Distrik               | 200.000.000 | 7 Distrik | 200.000.000 |
| 2.08.03.2.02    | Penyedia layanan nyaman bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota   |  |            |            | 150.000.000 |                         | 100.000.000 |           | 100.000.000 |                         | 100.000.000 |           | 100.000.000 |
| 2.08.03.2.02.01 | Penyedia layanan perlindungan nyaman bagi perempuan korban kekerasan kabupaten/kota  | Terlaksanya Penyedia layanan perlindungan nyaman bagi perempuan korban kekerasan kabupaten/kota  | 23 Distrik | 11 Distrik | 150.000.000 | 3 Distrik               | 100.000.000 | 3 Distrik | 100.000.000 | 3 Distrik               | 100.000.000 | 3 Distrik | 100.000.000 |
| 2.08.03.2.03    | Pengaratan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tinjauan korban kekerasan kabupaten/kota                                       |  |            |            | 75.216.000  |                         | 100.000.000 |           | 100.000.000 |                         | 100.000.000 |           | 100.000.000 |
| 2.08.03.2.03.01 | Aduktif kebijakan dan pendampingan penyedia layanan dan penerima layanan bagi perempuan korban kekerasan kabupaten/kota                                    | Terlaksananya Aduktif kebijakan dan pendampingan penyedia layanan dan penerima layanan bagi perempuan korban kekerasan kabupaten/kota                                    | 23 Distrik | DPPB       | 79.216.000  |                         |             | 7 Distrik | 200.000.000 |                         |             |           |             |
| 2.08.03.2.03.04 | Pengaratan jajarang atau lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan kabupaten/kota   | Terlaksananya Pengaratan jajarang atau lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan kabupaten/kota   | 23 Distrik |            |             | 5 Distrik dan 5 kampung | 150.000.000 |           |             | 5 Distrik dan 5 kampung | 100.000.000 | 5 Distrik | 100.000.000 |
| 2.08.06         | PROGRAM PEMERUHAN HAK ANAK (PHA)   |  |            |            |             |                         | 425.200.000 |           | 350.000.000 |                         | 150.000.000 |           | 750.000.000 |
| 2.08.06.2.01    | Pelaksanaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota   |  |            |            |             |                         | 250.000.000 |           | 150.000.000 |                         |             |           | 250.000.000 |
| 2.08.06.2.01.01 | Aduktif kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah/nonpemerintah/media dan (PHA) dunia usaha kewenangan kabupaten/kota          | Terlaksananya Aduktif kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah/nonpemerintah/media dan (PHA) dunia usaha kewenangan kabupaten/kota          | 23 Distrik |            |             | 7 Distrik dan 7 kampung | 100.000.000 |           |             |                         |             | 7 Distrik | 300.000.000 |
| 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelibatagan hak anak kewenangan kabupaten/kota   | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelibatagan hak anak kewenangan kabupaten/kota   | 23 Distrik |            |             | 5 Distrik dan 5 kampung | 150.000.000 | 5 Distrik | 150.000.000 |                         |             | 5 Distrik | 150.000.000 |
| 2.08.04.2.02    | Pengaratan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak kewenangan kabupaten/kota   |  |            |            |             |                         | 175.200.000 |           | 200.000.000 |                         | 150.000.000 |           | 350.000.000 |
| 2.08.04.2.02.03 | Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peringkat kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peringkat kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | 23 Distrik |            |             | 8 Distrik dan 8 kampung | 175.200.000 | 5 Distrik | 200.000.000 | 5 Distrik               | 150.000.000 | 5 Distrik | 150.000.000 |

Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ambarawa  
2021 - 2025

|                 |  |  |            |              |                         |              |                        |              |                        |                |                        |              |
|-----------------|--|--|------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 2.08.04.2.02.04 | Pengaturan jejeran yang antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota                         | Terlaksananya Pengaturan jejeran yang antar lembaga penyedia layanan perlindungan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota                        | 23 Distrik |              |                         |              |                        |              |                        | 5 Distrik      | 280.000.000;           |              |
| 2.08.07         | PROGRAM PERLINDUNGAN KHASUS ANAK   |  |            | 285.620.000  | 406.100.000;            |              | 580.000.000;           |              | 700.000.000;           | 700.000.000;   |                        |              |
| 2.08.07.2.01    | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota  |  |            | 285.620.000  | 336.100.000;            |              | 280.000.000;           |              | 280.000.000;           | 280.000.000;   |                        |              |
| 2.08.07.2.01.01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | 23 Distrik | 11 Distrik   | 5 Distrik dan 5 kampung | 256.100.000; | 5 Distrik              | 200.000.000; | 5 Distrik              | 200.000.000;   | 200.000.000;           |              |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan sinkronisasi percepatan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota   | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi percepatan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota   | 23 Distrik |              | Ags. Jayapura, Jakarta  | 80.000.000;  | Ags. Jayapura, Jakarta | 80.000.000;  | Ags. Jayapura, Jakarta | 80.000.000;    | Ags. Jayapura, Jakarta |              |
| 2.08.07.2.02    | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota                    |  |            |              |                         |              | 400.000.000;           |              | 300.000.000;           | 300.000.000;   |                        |              |
| 2.08.07.2.02.03 | Pengembangan komunikasi informal dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota                              | Terlaksananya Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota                             | 23 Distrik |              |                         |              | 7 Distrik              | 200.000.000; | 7 Distrik              | 200.000.000;   | 7 Distrik              | 200.000.000; |
| 2.08.07.2.02.04 | Pengaturan jejeran antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota                         | Terlaksananya Pengaturan jejeran antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota                         | 23 Distrik |              |                         |              | 5 Distrik              | 200.000.000; | 5 Distrik              | 100.000.000;   | 5 Distrik              | 100.000.000; |
| 2.08.07.2.03    | Pengaturan dan pendampingan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota             |  |            |              | 70.000.000;             | 100.000.000; |                        | 200.000.000; |                        | 200.000.000;   |                        |              |
| 2.08.07.2.03.01 | Koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota    | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota    | 23 Distrik |              | Ags. Jayapura, Jakarta  | 70.000.000;  | Ags.                   | 500.000.000; | Ags.                   | 200.000.000;   | Aks.                   | 200.000.000; |
| 2.14            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  |  |            | 155.000.000; | 2.055.000.000;          |              | 2.065.000.000;         |              | 1.805.000.000;         | 1.605.000.000; |                        |              |
| 2.14.02         | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK  |  |            |              |                         |              |                        |              |                        |                |                        |              |

Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Armat  
2021 - 2025

|                 |  |  |                                |  |                             |                                       |                             |                                       |                             |   |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 2.14.02.2.01    | Penerapan dan sinkronisasi<br>Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk |  |                                | 111.000.000;   | 1.655.000.000;              |                                       | 1.655.000.000;              | 1.161.000.000;                        | 1.051.000.000;              | ;   |
| 2.14.02.2.01.01 | Peningkatan kelayakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga program KKBPK                | Terlaksananya Penyusunan<br>kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga program KKBPK            | 23 Distrik                     | Jayapura, Jakarta,<br>Agnit, Agam, Aisy,<br>Aiy, Sint,<br>Bacchani, Sawa<br>Erau, Suro, Raya | 550.000.000;                | 8 Distrik                             | 500.000.000;                | 8 Distrik                             | 500.000.000;                | 8 Distrik                                   |
| 2.14.02.2.01.02 | Peningkatan dan peningkatan standar desain pembangunan kependudukan (SDPK) Tingkat kabupaten/kota  | Terlaksananya Penyusunan<br>dan peningkatan standar desain pembangunan kependudukan (SDPK) Tingkat kabupaten/kota  | 23 Distrik                     | Kabupaten Armat,<br>Jayapura, Jakarta  | 350.000.000;                | Kabupaten Armat,<br>Jayapura, Jakarta | 350.000.000;                | Kabupaten Armat,<br>Jayapura, Jakarta | 350.000.000;                | Kabupaten<br>Armat,<br>Jayapura,<br>Jakarta |
| 2.14.02.2.01.04 | Pelaksanaan survei/pendataan<br>indeks pengembangan manusia<br>tentang kependudukan  | Terlaksananya Pelaksanaan<br>survei/pendataan indeks<br>pengembangan manusia<br>tentang kependudukan   | 23 Distrik                     | 7 Distrik  | 155.000.000;                | 7 Distrik                             | 155.000.000;                | 7 Distrik                             | 200.000.000;                | 7 Distrik                                   |
| 2.14.02.2.02    | Penerapan perlakuan penduduk<br>cabang daerah kabupaten/kota   |  |                                |  | 1.000.000.000;              |                                       | 1.000.000.000;              | 700.000.000;                          | 550.000.000;                |   |
| 2.14.02.2.02.03 | Pengurangan profil kependudukan<br>keluarga berencana dan<br>pembangunan keluarga  | Terlaksananya Penyusunan<br>profil kependudukan keluarga<br>berencana dan pembangunan<br>keluarga  | 23 Distrik                     | Kabupaten Armat,<br>Jayapura, Jakarta  | 250.000.000;                | Kabupaten Armat,<br>Jayapura, Jakarta | 250.000.000;                |                                       |                             |   |
| 2.14.02.2.02.08 | Membentuk rumah data<br>kependudukan di kampung X<br>untuk mempermudah integrasi<br>program KKBPK di sektor lain                                       | Terlaksananya Membentuk<br>rumah data kependudukan di<br>kampung X untuk<br>mempermudah integrasi<br>program KKBPK di sektor lain                                  | 19 Distrik dan 19<br>kampung X |  | 5 Distrik                   | 200.000.000;                          | 5 Distrik                   | 200.000.000;                          | 4 Distrik                   | 200.000.000;                                |
| 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan pelaporan data<br>pengendalian lapangan dan<br>pelayanan X  | Terlaksananya Pengolahan<br>dan pelaporan data pengendalian<br>lapangan dan pelayanan X  | 23 Distrik                     |  | 17 pulaemas                 | 255.000.000;                          | 17 pulaemas                 | 255.000.000;                          | 17 pulaemas                 | 100.000.000;                                |
| 2.14.02.2.02.14 | Pembinaan dan pengawasan<br>pencatatan dan pelaporan<br>program KKBPK  | Terlaksananya Pembinaan dan<br>pengawasan pencatatan dan<br>pelaporan program KKBPK  | 23 Distrik                     |  | 5 Distrik                   | 250.000.000;                          | 5 Distrik                   | 250.000.000;                          | 5 Distrik                   | 250.000.000;                                |
| 2.14.03         | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>KELUARGA BERENCANA (KB)  |  |                                | 4.036.720.000;   | 1.860.000.000;              |                                       | 1.574.000.000;              | 1.262.000.000;                        | 1.060.000.000;              | :   |
| 2.14.03.01      | Pelaksanaan advokasi<br>komunikasi informasi dan<br>edukasi (KIE) pengendalian<br>penduduk dan KB sesuai<br>kearifan budaya lokal                      |  |                                | 26.670.000;  | 500.000.000;                |                                       | 600.000.000;                | 500.000.000;                          | 300.000.000;                |   |
| 2.14.03.01.02   | Komunikasi informasi dan edukasi<br>(KIE) program KKBPK sesuai<br>kearifan budaya lokal  | Terlaksananya Komunikasi<br>informasi dan edukasi (KIE)<br>program KKBPK sesuai kearifan<br>budaya lokal   | 23 Distrik                     | Distrik Agam   | 150.000.000;                | 3 Distrik                             | 150.000.000;                | 3 Distrik                             | 150.000.000;                | 3 Distrik                                   |
| 2.14.03.01.04   | Promosi dan KIE program KKBPK<br>melalui Media Mass cetak dan<br>elektronik serta media luar ruang   | Terlaksananya Promosi dan KIE<br>program KKBPK melalui Media<br>Mass cetak dan elektronik<br>serta media luar ruang  | 23 Distrik                     |  | Amat, Jakarta<br>(Hargamed) | 150.000.000;                          | Amat, Jakarta<br>(Hargamed) | 150.000.000;                          | Amat, Jakarta<br>(Hargamed) | 100.000.000;                                |
| 2.14.03.01.06   | Pelaksanaan mekanisme<br>operasional program KKBPK<br>melalui rapat koordinasi<br>(Rakorcam), rapat koordinasi desa<br>(Rakordes) dan mini lokal       | Terlaksananya Pelaksanaan<br>mekanisme operasional<br>program KKBPK melalui rapat<br>koordinasi (Rakorcam), rapat<br>koordinasi desa (Rakordes),<br>dan mini lokal | 23 Distrik                     |  | 8 Distrik dan 2<br>Kampung  | 200.000.000;                          | 8 Distrik                   | 200.000.000;                          | 8 Distrik                   | 100.000.000;                                |

Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ambarawa  
2021 - 2025

|                 |  |   |             |               |               |  |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|--|---|-------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.14.03.2.02    | Peningkatan tenaga penyuluhan KB/Pengajar Lapangan KB (PKB/PLKB)   |   |             | 2.017.040.000 |               | 200.000.000  |             | 100.000.000 |             | 100.000.000 |             | 100.000.000 |             |
| 2.14.03.2.02.01 | Pembinaan MIF dan Program KCBPC di Unit lapangan oleh PKB/PLKB   | Terkakasanya Pembinaan MIF dan Program KCBPC di Unit lapangan oleh PKB/PLKB   | 23 Distrik  | 23 Distrik    | 507.040.000   | 3 Distrik  | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 |
| 2.14.03.2.02.02 | Pembinaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB  | Terkakasanya Pengelolaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB  | Penyuluh KB | Penyuluh KB   | 1.400.000.000 |  |             | Penyuluh KB | 100.000.000 | Penyuluh KB | 100.000.000 | Penyuluh KB | 100.000.000 |
| 2.14.03.2.02.03 | Pengakuan pelaksanaan penyuluhan penggerakkan pelajaran dan pemusangan program KCBPC untuk pelajaran keluarga berencana/penyuluhan lapangan keluarga   | Terkakasanya Pengelolaan pelaksanaan penyuluhan penggerakkan pelajaran pelajaran dan pemusangan program KCBPC untuk pelajaran keluarga berencana/penyuluhan lapangan keluarga | 23 Distrik  |               |               | 3 Distrik  | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 |
| 2.14.03.2.03    | Pengendalian dan peninderaan kebutuhan alat dan obat kontracepsi serta pelaksanaan pelajaran KB di daerah kabupaten/kota                               |   |             | 2.773.010.000 |               | 360.000.000  |             | 676.000.000 |             | 462.000.000 |             | 462.000.000 |             |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian dan peninderaan kebutuhan alat dan obat kontracepsi dan sarana penunjang pelajaran KB ketahuan kesubtan termasuk jaringan dan jejaringnya | Terkakasanya Pengendalian peninderaan kebutuhan alat dan obat kontracepsi dan sarana penunjang pelajaran KB ketahuan kesubtan termasuk jaringan dan jejaringnya               | 23 Distrik  | 10 Distrik    | 177.840.000   | 11 Distrik   | 100.000.000 | 11 Distrik  | 300.000.000 | 11 Distrik  | 100.000.000 | 11 Distrik  | 100.000.000 |
| 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan pelajaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya                               | Terkakasanya Pembinaan pelajaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya   | 23 Distrik  | 17 Distrik    | 1.567.114.000 | 3 Distrik  | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 |             |
| 2.14.03.2.03.09 | Promosi dan lensing kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan   | Terkakasanya Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan   | 23 Distrik  | 3 Distrik     | 376.000.000   | 5 Distrik  | 160.000.000 | 5 Distrik   | 276.000.000 | 5 Distrik   | 160.000.000 | 5 Distrik   | 160.000.000 |
| 2.14.03.2.03.10 | Peningkatan kompetensi tenaga pelajaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi  | Terkakasanya Peningkatan kompetensi tenaga pelajaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi  | 23 Distrik  | 12 Distrik    | 640.166.000   | 3 Distrik  | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 | 100.000.000 | 3 Distrik   | 100.000.000 |             |
| 2.14.04         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |   |             |               |               |  |             | 90.006.231  |             | 309.401.043 |             | 190.000.000 |             |
| 2.14.04.2.01    | Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga  |   |             |               |               | 190.000.000  |             | 90.006.231  |             | 309.401.043 |             | 190.000.000 |             |
| 2.14.04.2.01.03 | Orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BK, BQ, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPK))     | Terkakasanya Orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BK, BQ, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPK))               | 23 Distrik  |               |               | Agrit, SMP<br>Pengajar Muks, SMP Yopis, SMP<br>Negeri 2, Agrit, SMK<br>Karya, SMA Yun<br>Smit, SMK Yipp<br>Agrit | 190.000.000 | 5 Distrik   | 90.006.231  | 5 Distrik   | 309.401.043 | 5 Distrik   | 190.000.000 |



# SERTIFIKAT



APRESIASI

DIBERIKAN KE

## DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ASMAT

ATAS PARTISIPASI SEBAGAI PESERTA PADA KEGIATAN PAMERAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024 YANG MENGUSUNG TEMA "TUMBUH, MAJU MENUJU KEMANDIRIAN YANG BERMARTABAT MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045" PADA TANGGAL 30 AGUSTUS S/D 01 SEPTEMBER 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
PROVINSI PAPUA SELATAN

BUPATI



WAKIL BUPATI

THOMAS EPPE SAFANPO, ST.













